

# Peran Program Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kota Binjai

Salsabilla<sup>1</sup>, Nurul Jannah<sup>2\*</sup>, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara <sup>1,2,3</sup>

[lalaasalsa9@gmail.com](mailto:lalaasalsa9@gmail.com), [nuruljannah@uinsu.ac.id](mailto:nuruljannah@uinsu.ac.id), [mlathiefilhamy@uinsu.ac.id](mailto:mlathiefilhamy@uinsu.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 2 Oktober 2025

Disetujui : 23 Oktober 2025

Dipublikasi : 30 Oktober 2025

## ABSTRACT

*This study analyzes the role of the Cooperative and SME Office in empowering and developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Binjai City. It examines implemented programs, implementation processes, and obstacles faced by the Office and MSME actors. This qualitative field study employed purposive sampling and collected data through semi-structured interviews with key informants (the Head of the Cooperative and SME Office, Office staff, and selected MSME actors), participant observation of program activities, and document review. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model (data reduction, data display, and conclusion drawing/verification) and triangulated across sources to enhance validity. Findings indicate that the Office has implemented entrepreneurship training, production-equipment assistance, facilitation of Business Identification Number (NIB) issuance, and MSME exhibitions. Major constraints include limited budget allocations, absence of honoraria for supporting personnel, insufficient information dissemination, and exclusion of non-member MSMEs from program benefits. Theoretically, the study reaffirms the strategic role of local government in MSME empowerment through structured programs. Practically, it recommends prioritizing efficient budget allocation, expanding digital information channels, and designing inclusive outreach mechanisms so that non-member MSMEs can also benefit.*

**Keywords:** MSME empowerment; MSME development; Cooperative and SME Office programs; program management

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan vital dalam struktur perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Dinas Koperasi dan UKM sebagai lembaga pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan (Raharja, 2021).

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan yang bertujuan memperkuat efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha (Harahap et al., 2022). Sejalan dengan misi pertama Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai, yaitu meningkatkan perannya sebagai pusat perumusan kebijakan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, dinas ini memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program yang sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.



Pemberdayaan UMKM mencakup serangkaian upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, kemampuan manajerial, dan daya saing pelaku usaha melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya (Antonius Ary Setyawan et al., 2025). Sementara itu, pengembangan UMKM lebih menekankan pada perluasan kapasitas produksi, inovasi produk, serta peningkatan akses pasar guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha (Mariska et al., 2023)

Perkembangan jumlah UMKM di Kota Binjai menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai dan Dinas Koperasi dan UKM (BPS Kota Binjai, 2024), jumlah UMKM tercatat sebanyak 9.972 unit pada tahun 2019, meningkat menjadi 18.181 unit pada tahun 2020, dan mencapai 20.852 unit pada tahun 2021. Angka ini relatif stabil selama 2022–2023 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 21.601 unit. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika positif sektor UMKM, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam hal pengelolaan, pendampingan, dan keberlanjutan program pengembangan (Yolanda, 2024)

Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai telah melaksanakan berbagai program strategis seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha (NIB dan sertifikasi halal), serta bantuan sarana produksi. Program tersebut berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk memulai usaha mandiri sekaligus membantu UMKM eksisting agar lebih berdaya saing (Siregar & Marliyah, 2022). Selain itu, pelaku usaha juga difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pameran produk UMKM pada acara resmi pemerintah daerah seperti perayaan HUT Kota Binjai guna memperluas pasar dan memperkenalkan produk lokal.

Namun, pada tataran implementasi, belum seluruh pelaku UMKM merasakan manfaat program secara merata. Sebagian pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan informasi terkait kegiatan pemberdayaan, komunikasi program yang tidak berkelanjutan, serta keterbatasan jaringan pemasaran. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan (Siti Nurhalita & Imsar, 2022), yang mengindikasikan bahwa efektivitas pemberdayaan UMKM masih menghadapi kendala struktural dan operasional.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan pola yang serupa di wilayah lain. (Lestari et al., 2024) meneliti pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kota Palopo yang berfokus pada bantuan modal produktif dan pelatihan kewirausahaan. Sementara itu, (Maria Advensia Tia et al., 2024) meneliti efektivitas peranan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka melalui pelatihan teknis serta pembangunan rumah pemasaran produk UMKM. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada jenis program yang dilaksanakan tanpa mengulas secara mendalam efektivitas pelaksanaan dan kendala kontekstual di tingkat kota.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah menelaah pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM di beberapa daerah, kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas serta hambatan implementasi program di tingkat kota dengan pendekatan langsung terhadap pelaku UMKM masih terbatas. Selain itu, literatur sebelumnya belum banyak menggabungkan perspektif kelembagaan dengan pengalaman empiris pelaku usaha sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif peran, efektivitas, dan kendala implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Binjai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran program Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM di Kota Binjai serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana bentuk peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan, serta mengungkap hambatan utama dan alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan UMKM di tingkat daerah.

## STUDI LITERATUR

### Empowerment Theory

Empowerment Theory yang dikemukakan oleh Zimmerman (1995) menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan individu, kelompok, dan komunitas untuk memperoleh kendali atas kehidupannya melalui peningkatan kompetensi, partisipasi, dan akses

terhadap sumber daya. Dalam konteks pengembangan UMKM, teori ini menyoroti pentingnya peran lembaga pemerintah dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan dirinya dalam mengelola bisnis secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan material, tetapi juga penguatan kapasitas mental, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan Empowerment Theory dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana Dinas Koperasi dan UKM bertindak sebagai enabler yang menyediakan ruang dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses legalitas dan permodalan, dinas berupaya meningkatkan aspek intrapersonal (kepercayaan diri dan kontrol diri), interaksional (kemampuan memahami sistem sosial-ekonomi), dan behavioral (partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi). Pemberdayaan yang efektif diukur dari sejauh mana pelaku UMKM dapat mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata untuk meningkatkan daya saing usahanya.

### **Resource-Based View (RBV)**

Teori Resource-Based View menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif organisasi sangat bergantung pada sumber daya yang dimilikinya, baik berupa aset fisik, kemampuan manajerial, maupun modal manusia yang bersifat valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Dalam konteks lembaga publik seperti Dinas Koperasi dan UKM, teori ini membantu memahami bagaimana keterbatasan sumber daya terutama sumber daya keuangan dan SDM mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan dan mendistribusikan sumber daya yang ada secara strategis.

Dalam kerangka RBV, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pembatas bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam mencapai kinerja optimal. Namun, teori ini juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dinas dapat memperoleh keunggulan fungsional melalui kemitraan dengan pihak swasta, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM. Dengan demikian, RBV memberikan perspektif strategis bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan fondasi bagi efektivitas kebijakan pemberdayaan di tingkat daerah.

### **Public Service Logic**

Public Service Logic berangkat dari paradigma bahwa nilai publik tidak dihasilkan secara sepihak oleh pemerintah, tetapi melalui proses co-creation dengan masyarakat sebagai penerima layanan (Doverianda et al., 2025). Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, berperan sebagai fasilitator yang mengorkestrasi kolaborasi antara berbagai aktor: pelaku UMKM, komunitas bisnis, dan institusi pendukung lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun saluran komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif agar layanan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, Public Service Logic relevan untuk menjelaskan pentingnya keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam setiap tahap program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program yang dikembangkan melalui partisipasi bersama memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan jangka panjang karena menciptakan rasa kepemilikan bersama (shared ownership). Dengan demikian, nilai publik tercipta bukan hanya melalui efektivitas kebijakan, tetapi juga melalui tingkat partisipasi dan kolaborasi yang terbangun antara Dinas Koperasi dan UKM dan pelaku UMKM.

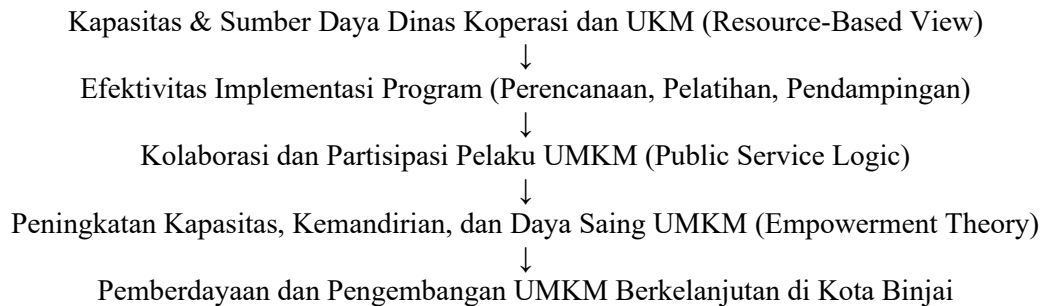
### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Ketiga teori tersebut membentuk dasar konseptual penelitian ini. Empowerment Theory menjelaskan bagaimana pemberdayaan pelaku UMKM terjadi melalui peningkatan kapasitas individu dan sosial; RBV menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya internal dinas mempengaruhi efektivitas program; sementara Public Service Logic menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan nilai publik. Kombinasi ketiganya menggambarkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM di Kota Binjai ditentukan

oleh interaksi sinergis antara kapasitas kelembagaan, strategi pelaksanaan, dan keterlibatan pelaku usaha dalam proses pembangunan ekonomi lokal.

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui alur logis berikut:

Bagan Alur Konseptual Penelitian:



### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada makna, proses, serta konteks sosial dari peran program Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di Kota Binjai. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai serta beberapa pelaku UMKM binaannya. Penelitian dilakukan selama bulan Februari hingga Mei 2025, ketika sebagian besar program pemberdayaan sedang berjalan aktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi guna memperoleh data yang faktual dan kontekstual (Yusanto, 2020). Melalui studi lapangan ini, peneliti dapat memahami bagaimana implementasi program pemberdayaan dijalankan, kendala yang dihadapi, dan dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan kunci dan pendukung. Informan utama terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 3 orang pegawai Dinas Koperasi dan UKM yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta 6 pelaku UMKM dari tiga sektor usaha (kuliner, kerajinan tangan, dan penjahit pakaian). Data sekunder diperoleh dari dokumen internal dinas, laporan tahunan, data statistik resmi, serta literatur yang relevan.

Rincian informan disajikan pada tabel berikut:

No	Nama Samaran	Jabatan/Peran	Sektor Usaha Lama	Usaha (Tahun)
1	Bapak Hafiz	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	-	-
2	Bapak Tedy	Staf Program Pemberdayaan	-	-
3	Ibu Vivi	Staf Pendamping UMKM	-	-
4	Bapak Sani	Staf Bidang Pelatihan	-	-
5	Bapak Arif	Pelaku UMKM Kuliner	Kuliner	6
6	Ibu Ratna	Pelaku UMKM Kuliner	Kuliner	4
7	Ibu Marni	Pelaku UMKM Kerajinan Tangan	Kerajinan	8
8	Ibu Heni	Pelaku UMKM Kerajinan Tangan	Kerajinan	5
9	Ibu Mayang	Pelaku UMKM Jahit Pakaian	Fashion	7
10	Ibu Musda	Pelaku UMKM Jahit Pakaian	Fashion	3

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan atau penerimaan manfaat

program pemberdayaan. Variasi sektor usaha dipilih agar hasil penelitian merepresentasikan pengalaman dari beragam bidang ekonomi lokal.

Teknik Pengumpulan Data utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dibantu dengan panduan wawancara dan lembar observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Observasi, untuk mengamati kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pameran produk UMKM yang diadakan oleh dinas.
- Wawancara mendalam, dilakukan secara tatap muka dengan informan utama dan pendukung, masing-masing selama 45–60 menit.
- Dokumentasi, mencakup data arsip, laporan kegiatan, serta dokumentasi foto pelaksanaan program.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama:

- Reduksi data (*data reduction*): proses seleksi dan penyederhanaan data hasil wawancara serta observasi untuk menemukan tema-tema utama.
- Penyajian data (*data display*): pengorganisasian data dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan hubungan antar kategori.
- Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*): interpretasi temuan dengan memeriksa konsistensi antar sumber data.

Proses analisis dilakukan melalui coding tematik, di mana kutipan wawancara diberi label berdasarkan kategori makna tertentu. Contoh sederhana proses coding:

“Kami senang ada pelatihan, tapi tidak semua peserta mendapat alat bantu usaha.”  
→ Kode awal: Ketimpangan bantuan → Tema: Kendala implementasi program

Untuk menunjukkan transparansi proses analisis, tabel berikut menggambarkan hasil coding tematik yang diperoleh dari wawancara lapangan:

No	Pernyataan Data (Kutipan Lapangan)	Kode Awal	Sub-Tema	Tema Utama
1	“Kami sering dapat pelatihan dari dinas, tapi tidak selalu lanjut ke pendampingan setelah pelatihan.”	Keterbatasan tindak lanjut program	Kurangnya kesinambungan pelatihan	Efektivitas pelaksanaan program
2	“Pelaku usaha yang belum punya NIB sulit ikut program, jadi yang belum terdaftar sering tertinggal.”	Akses terbatas karena legalitas	Hambatan administratif dan regulatif	Tantangan implementasi
3	“Anggaran dari dinas terbatas, kadang program ditunda karena tidak cukup dana operasional.”	Kekurangan anggaran	Keterbatasan sumber daya finansial	Tantangan implementasi
4	“Kami diajak ikut pameran produk, dari situ bisa dapat pembeli baru dan pesanan meningkat.”	Partisipasi dalam promosi	Peningkatan akses pasar	Dampak pemberdayaan
5	“Ada kerja sama dengan bank, tapi banyak UMKM takut pinjam karena belum paham syaratnya.”	Kurangnya literasi keuangan	Hambatan permodalan	Tantangan implementasi
6	“Setelah ikut pelatihan, saya lebih percaya diri memasarkan produk secara online.”	Peningkatan kepercayaan diri	Peningkatan kapasitas individu	Dampak pemberdayaan
7	“Dinas sering melibatkan kami dalam diskusi program baru, jadi kami merasa didengar.”	Keterlibatan pelaku usaha	Partisipasi dan co-creation	Peran strategis dinas

No	Pernyataan Data (Kutipan Lapangan)	Kode Awal	Sub-Tema	Tema Utama
8	“Masih ada yang belum tahu informasi program, karena sosialisasinya lewat grup tertentu saja.”	Informasi belum merata	Komunikasi dan transparansi terbatas	Tantangan implementasi
9	“Pendamping dari dinas sangat membantu saat proses sertifikasi halal dan NIB.”	Dukungan teknis langsung	Penguatan kelembagaan dan legalitas	Peran strategis dinas
10	“Program bagus, tapi kalau tidak ada alat bantu atau follow-up, manfaatnya cepat hilang.”	Kurangnya monitoring dan tindak lanjut	Evaluasi dan keberlanjutan program	Efektivitas pelaksanaan program

Tabel tersebut menunjukkan bagaimana peneliti menafsirkan data lapangan menjadi struktur tematik yang sistematis. Tahap open coding menghasilkan daftar kode awal, axial coding mengelompokkan kode menjadi sub-tema, sedangkan selective coding menyatukan sub-tema ke dalam tiga tema utama: (1) Peran Strategis Dinas Koperasi dan UKM, (2) Tantangan Implementasi Program, dan (3) Dampak Pemberdayaan UMKM.

Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi.

Etika penelitian dijaga dengan menerapkan prinsip informed consent, di mana seluruh informan diberi penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian sebelum wawancara dimulai. Persetujuan partisipasi diperoleh secara sukarela, tanpa paksaan. Peneliti juga menjamin kerahasiaan identitas informan dengan menggunakan nama samaran, serta memastikan bahwa seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas peran program Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di Kota Binjai serta memberikan dasar empiris bagi penguatan kebijakan pengembangan UMKM di tingkat daerah.

## HASIL

### Program Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Kota Binjai

Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai berperan penting dalam merancang dan menjalankan berbagai program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hafiz (Kepala Dinas Koperasi dan UKM, 15 Maret 2025), dinas secara konsisten melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup aspek pengemasan produk, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. Selain itu, dinas juga memberikan bantuan alat usaha dan memfasilitasi akses legalitas melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut Bapak Tedy (Staf Program Pemberdayaan, 16 Maret 2025), dinas mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk kegiatan pelatihan karena dianggap memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas usaha. Sementara itu, pelaku UMKM seperti Bapak Arif (UMKM Kuliner, 17 Maret 2025) menegaskan bahwa pelatihan digital marketing membantu mereka memahami strategi promosi produk di media sosial dan marketplace.

Berikut disajikan tabel tematik yang merangkum hasil temuan lapangan terkait program pemberdayaan UMKM di Kota Binjai:

No	Program	Tujuan	Dampak	Hambatan	Sumber Data
1	Pelatihan kewirausahaan (manajemen keuangan, digital)	Meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan produksi	Pelaku UMKM lebih percaya diri dan mampu	Peserta terbatas dan tindak lanjut pelatihan belum berkelanjutan	Wawancara: Ibu Mayang, Ibu Marni, 15–17 Maret 2025

No	Program	Tujuan	Dampak	Hambatan	Sumber Data
	marketing, pengemasan produk)		memperluas pasar		
2	Bantuan alat usaha (alat masak, mesin jahit, alat tenun)	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM	Produktivitas meningkat, kualitas produk lebih baik	Bantuan tidak rutin akibat keterbatasan anggaran	Wawancara: Bapak Arif, Ibu Musda, 18–19 Maret 2025
3	Fasilitasi legalitas usaha (NIB, sertifikasi halal, sertifikat tanah)	Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha	Akses pembiayaan lebih mudah, usaha lebih formal	Sebagian pelaku belum memahami prosedur digitalisasi	Wawancara: Ibu Heni, Ibu Ratna, 20 Maret 2025
4	Pameran dan promosi UMKM	Memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk lokal	Omzet meningkat dan produk lebih dikenal masyarakat	Jumlah peserta terbatas karena keterbatasan anggaran	Wawancara: Ibu Marni, Ibu Mayang, 21 Maret 2025

Hasil wawancara dengan Ibu Vivi (Staf Pendamping UMKM, 20 Maret 2025) menunjukkan bahwa program pelatihan menjadi kegiatan paling rutin dilaksanakan dalam tiap tahunnya. Kemudian kegiatan pameran produk UMKM dalam acara peringatan HUT Kota Binjai dan MTQ menjadi ajang efektif bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan dan meningkatkan penjualan.

### Upaya Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan melalui tahapan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Bapak Sani (Staf Bidang Pelatihan, 19 Maret 2025), tahap perencanaan dilakukan dengan memetakan kebutuhan pelaku UMKM melalui survei lapangan dan masukan komunitas. Pengorganisasian melibatkan pembentukan tim teknis dari pegawai dinas, sedangkan evaluasi dilakukan melalui laporan kegiatan dan observasi pasca-pelatihan.

Dalam hal komunikasi program, dinas mengandalkan grup WhatsApp komunitas UMKM dan kerja sama dengan pihak kelurahan. Namun, menurut Ibu Mayang (UMKM Jahit, 21 Maret 2025), informasi program belum sepenuhnya menjangkau semua pelaku usaha. Hal ini menyebabkan sebagian UMKM non-binaan tidak mengetahui jadwal pelatihan atau pameran yang dilaksanakan.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa strategi komunikasi berbasis media sosial dinilai efektif namun masih terbatas cakupannya. Menurut Bapak Hafiz (Kepala Dinas Koperasi dan UKM), dinas sedang berupaya mengembangkan kanal informasi berbasis website agar akses program lebih merata dan transparan.

### Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Program

Kendala utama yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM adalah keterbatasan anggaran daerah. Menurut Bapak Tedy, “sejak tahun 2024, beberapa program seperti bantuan alat usaha tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan dana operasional.” Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap frekuensi kegiatan pemberdayaan dan jumlah UMKM yang dapat difasilitasi. Selain itu, hambatan lain adalah keterbatasan tenaga pendamping dan insentif bagi pegawai lapangan. Akibatnya, beberapa kegiatan logistik seperti penyimpanan alat bantuan dilakukan secara mandiri oleh pegawai tanpa dukungan honorarium tambahan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dalam mengelola sumber daya manusia dan finansial

(Polem & Sudiarti, 2022). Sebagai solusi, dinas berencana memperluas kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan kegiatan. Menurut Bapak Hafiz, “kerja sama dengan pihak swasta diharapkan menjadi alternatif untuk memperluas cakupan program tanpa menunggu dana APBD.”

Program pemberdayaan UMKM di Kota Binjai meliputi pelatihan, bantuan alat usaha, legalitas, dan promosi produk. Hambatan utama pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran dan kurang meratanya akses informasi. Upaya solusi dilakukan melalui penguatan kolaborasi dan digitalisasi sistem komunikasi program.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan kapasitas personal, sosial, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Empowerment Theory oleh Zimmerman (1995), yang menekankan pentingnya peningkatan kontrol individu terhadap kehidupannya melalui partisipasi dan peningkatan kompetensi. Pelatihan kewirausahaan dan digital marketing yang diberikan telah membantu pelaku UMKM meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, serta kesadaran terhadap potensi usaha mereka.

Namun, dimensi behavioral empowerment masih perlu diperkuat karena tidak semua pelaku UMKM memiliki partisipasi aktif dalam setiap program. Keterbatasan akses informasi dan belum meratanya jangkauan sosialisasi menyebabkan sebagian pelaku usaha tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang (Novita et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya inklusif, melainkan masih bersifat segmentatif bagi kelompok binaan tertentu.

Secara teoritis, fenomena ini menggambarkan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal pemberian pelatihan, melainkan proses transfer agency yang berkelanjutan. Ketika pemerintah daerah hanya berfokus pada dimensi pelatihan tanpa memastikan kesinambungan pendampingan, maka proses transformasi sosial ekonomi pelaku UMKM menjadi parsial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui empowerment chain mulai dari pelatihan, akses permodalan, hingga pendampingan pasca-program perlu menjadi prioritas kebijakan lokal agar efek pemberdayaan lebih mendalam dan berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pemberdayaan UMKM di Kota Binjai adalah keterbatasan sumber daya fiskal dan manusia. Berdasarkan Resource-Based View (McWilliams & Smart, 1995), keunggulan organisasi publik sangat bergantung pada kemampuan mengelola sumber daya yang bernilai dan langka. Namun, keterbatasan anggaran serta ketiadaan insentif bagi tenaga lapangan menggambarkan adanya institutional capacity gap yakni kesenjangan antara mandat kelembagaan dan kemampuan nyata dalam melaksanakan program.

Kondisi ini juga memperkuat literatur kebijakan publik daerah (Huda, 2024) yang menegaskan bahwa kelemahan kapasitas fiskal lokal berdampak langsung pada keberlanjutan program pemberdayaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perlu diarahkan pada inovasi sumber pembiayaan, efisiensi penggunaan anggaran, dan penguatan kolaborasi antar-sektor.

Selain itu, keterbatasan fiskal daerah menggambarkan adanya dependency structure antara pemerintah daerah dan pusat. Ketika anggaran pemberdayaan UMKM terlalu bergantung pada dana transfer pusat, fleksibilitas program menjadi terbatas. Dalam konteks ini, dinas perlu mengembangkan mekanisme resource recombination melalui kolaborasi dengan BUMN, CSR swasta, serta lembaga keuangan mikro untuk memperluas sumber daya non-APBD. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya tahan fiskal, tetapi juga meningkatkan efisiensi kelembagaan dalam mengoptimalkan potensi lokal.

Dari perspektif Public Service Logic (Mozin et al., 2025) nilai publik tercipta melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Program pameran UMKM dan kegiatan komunitas menjadi contoh nyata proses co-creation, di mana pelaku usaha berkontribusi aktif dalam membangun citra produk lokal. Namun, mekanisme komunikasi yang masih bersifat eksklusif menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum sepenuhnya partisipatif. Dengan memperluas kanal

informasi berbasis digital dan memperbanyak mitra kolaboratif, Dinas Koperasi dan UKM dapat memperkuat peran sebagai institusi pencipta nilai publik. Pemberdayaan yang berbasis kolaborasi akan meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperluas dampak sosial-ekonomi program terhadap masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, pendekatan Public Service Logic menekankan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi “penyedia layanan tunggal”, melainkan enabler yang menciptakan ruang kolaboratif antara warga, sektor swasta, dan komunitas. Dalam konteks Binjai, sinergi lintas aktor dapat mendorong munculnya inovasi sosial berbasis komunitas, seperti Binjai Creative Hub atau Digital Marketing Corner yang dikelola bersama. Strategi ini akan menciptakan nilai publik yang lebih berkelanjutan dan menggeser paradigma birokrasi menuju tata kelola partisipatif.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas penerapan Empowerment Theory dalam konteks kelembagaan publik lokal, dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan efektif memerlukan dukungan kapasitas institusional yang kuat (RBV) serta partisipasi aktif masyarakat (Public Service Logic). Secara praktis, penguatan kapasitas dinas melalui alokasi anggaran berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem UMKM di tingkat daerah.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai berperan signifikan dalam proses pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui empat program utama, yaitu pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan alat usaha, fasilitasi administrasi legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan penyelenggaraan pameran produk UMKM. Pertama, program pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas manajerial dan keterampilan pelaku usaha. Kedua, bantuan alat usaha mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Ketiga, fasilitasi administrasi legalitas. Keempat, pameran UMKM yang berkontribusi memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah kendala utama seperti keterbatasan anggaran, ketiadaan honorarium bagi pelaksana teknis, dan belum meratanya penyebaran informasi program. Kondisi ini menyebabkan manfaat pemberdayaan belum dirasakan secara inklusif oleh seluruh pelaku UMKM di Kota Binjai.

Hasil penelitian ini memperkuat penerapan Empowerment Theory dalam konteks kelembagaan publik daerah, di mana pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada pelatihan atau bantuan modal, tetapi juga pada keberlanjutan dukungan struktural dan kelembagaan. Selain itu, temuan terkait keterbatasan sumber daya dan ketergantungan fiskal daerah menegaskan relevansi Resource-Based View (RBV) dalam menjelaskan bagaimana kemampuan institusi memanfaatkan sumber daya menjadi kunci keberhasilan program. Dalam konteks Public Service Logic, penelitian ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan sinergi antaraktor sebagai mekanisme co-creation untuk menghasilkan nilai publik dalam kebijakan pemberdayaan UMKM.

Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan utama. Pertama, digitalisasi komunikasi publik melalui kanal daring resmi dan platform media sosial untuk memperluas akses informasi serta meningkatkan transparansi program. Kedua, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga keuangan mikro guna memperluas sumber pendanaan alternatif dan memperkuat keberlanjutan program. Ketiga, penyusunan mekanisme sustainability funding berbasis kolaborasi multi-sektor agar pelaksanaan program pemberdayaan tidak bergantung sepenuhnya pada APBD. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian kelembagaan, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan memperluas dampak sosial ekonomi bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Kota Binjai, jumlah informan yang terbatas pada pelaku UMKM binaan, serta belum mencakup dimensi perbandingan dengan daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan jumlah informan, melibatkan pelaku UMKM non-binaan, serta menelusuri variabel tambahan seperti efektivitas kebijakan digitalisasi atau model kemitraan lintas sektor. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemberdayaan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

## REFERENSI

- Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & Rieneke Ryke Kalalo. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Doverianda, B., Wardiyanto, B., & Setijaningrum, E. (2025). Membangun Layanan Publik yang Partisipatif: Studi Kasus SIPRAJA melalui Perspektif New Public Governance. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1559–1568. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3.1367>
- Harahap, R. S. P., Asmuni, & Soemitra, A. (2022). Islamic Smart City: Study of Literacy and Inclusion in Financial Behavior and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03), 10. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>
- Huda, C. M. (2024). Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Sovereignty*, 3(1), 1–7. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/998>
- Lestari, D., Pananrangi, A. R., & Suaib, M. R. (2024). Pelaksanaan Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Palopo. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, 3(2), 100–108. <https://doi.org/10.56326/jp.v3i2.5174>
- Maria Advensia Tia, Wilhelmina Mitran, & Paulus Libu Lamawitak. (2024). Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(4), 251–276. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.493>
- Mariska, R., Hasri Siregar, F., Khairi Ahmad, A., Hasanah, U., Wisnu Aji Pratama, C., Lubis, A.-Y., & Susilawati. (2023). Produk Unggulan UMKM Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Desa sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Refi Mariska, Pengembangan. *Journal of Human And Education*, 3(2), 292–298. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>
- McWilliams, A., & Smart, D. L. (1995). The Resource-Based View of the Firm. *Journal of Management Inquiry*, 4(4), 309–316. <https://doi.org/10.1177/105649269500400402>
- Mozin, S. Y., Arkani, S., & Labasir, S. N. (2025). Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi : Prinsip. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4, 198–2017. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit>
- Novita, D. R., Inda, T., Rahma, F., & Jannah, N. (2025). *Amkop Management Accounting Review (AMAR) Strategy for Developing Small and Medium Enterprises in Tahu Desa Laut Dendang , Deli Sedang Regency , Based on Masalah*. 5(2), 501–513. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.2903>
- Polem, R. I., & Sudiarti, S. (2022). Analysis of SMEs Empowerment and Assistance in Laut Dendang Village. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 1481–1490. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4.1013>
- Raharja, W. T. (2021). Empowerment of Small and Medium Enterprises (SMEs) Through Social Networks in Coastal Area of Surabaya City. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 132–142. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.652>
- Siregar, R., & Marliyah, M. (2022). Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i2.2143>
- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>